

SIARAN PERS

Badan Pemeriksa Keuangan
Perwakilan Provinsi Gorontalo



PENYERAHAN LAPORAN PEMERIKSAAN SEMESTER II TAHUN 2022 PADA PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO, KABUPATEN GORONTALO, DAN KABUPATEN BONE BOLANGO

Gorontalo, 26 Desember 2022

Bertempat di Auditorium Kantor BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo, Jalan Tinaloga No 3, Dulomo Selatan, Kota Utara, Kota Gorontalo, pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, Pukul 14.00 WITA dilaksanakan kegiatan Penyerahan Laporan Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Tahun 2019 sampai dengan Semester I Tahun 2022 pada Pemerintah Provinsi Gorontalo di Gorontalo dan Penyerahan Laporan Pemeriksaan Kinerja atas Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak dan Aman Tahun 2020 s.d. Semester I Tahun 2022 pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo dan Instansi Terkait Lainnya di Limboto dan pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan Instansi Terkait Lainnya di Suwawa.

Acara Penyerahan Laporan Pemeriksaan Kinerja dihadiri oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Gorontalo, Ahmad Luthfi H. Rahmatullah, Wakil Ketua I DPRD Provinsi Gorontalo, Moh. Kris Wartabone, Penjabat Gubernur Gorontalo, Hamka Hendra Noer, Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo, Syam T. Ase, Wakil Bupati Gorontalo, Hendra S. Hemeto, Ketua DPRD Kabupaten Bone Bolango, Halid Tangahu, Wakil Bupati Bone Bolango, Merla S. Uloli, serta Pejabat Struktural dan Fungsional BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo.

Kegiatan Penyerahan Laporan Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Strategi Nasional Pencegahan Korupsi Tahun 2019 sampai dengan Semester I Tahun 2022 pada Pemerintah Provinsi Gorontalo di Gorontalo dan Penyerahan Laporan Pemeriksaan Kinerja atas Penyediaan Akses Air Minum dan Sanitasi yang Layak dan Aman Tahun 2020 s.d. Semester I Tahun 2022 pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo dan Instansi Terkait Lainnya di Limboto dan pada Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dan Instansi Terkait Lainnya di Suwawa dilakukan dengan melaksanakan protokol kesehatan, bertujuan untuk mengurangi risiko penyebaran virus, yaitu dengan tidak berkumpul dalam jumlah besar, menjaga jarak, mengenakan masker serta rajin mencuci tangan.

Ahmad Luthfi H. Rahmatullah dalam sambutannya menyampaikan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja untuk menilai efektivitas strategi nasional pencegahan korupsi pada Pemerintah Provinsi Gorontalo dan menilai upaya Pemerintah Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango dalam menyediakan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman untuk mendukung pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat.

Kepala perwakilan menyampaikan pokok-pokok hasil pemeriksaan atas efektivitas strategi nasional pencegahan korupsi yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah diantaranya:

1. Biro PBJ Setda belum menyusun usulan Anjab dan ABK sesuai dengan Permenpan-RB Nomor 1 Tahun 2022 dan belum memenuhi kebutuhan sumber daya manusia (SDM) jabatan fungsional pengelola pengadaan barang dan jasa (JF PPBJ) sesuai dengan rekomendasi LKPP;
2. Pemerintah Provinsi Gorontalo dalam pelaksanaan dan pemanfaatan Bela Pengadaan belum sepenuhnya mendorong UMK Go Digital dan belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa yaitu efektif dan akuntabel; dan
3. Pemerintah Provinsi Gorontalo belum menyusun *road map* penerapan sistem merit, pola karir, standar kompetensi teknis, dan belum melaksanakan *talent pool*.

BPK menyimpulkan apabila permasalahan signifikan pada pelaksanaan aksi di atas tidak segera diatasi, maka dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan Stranas PK pada Pemerintah Provinsi Gorontalo.

Selanjutnya, Kepala perwakilan menyampaikan pokok-pokok hasil pemeriksaan atas penyediaan akses air minum dan sanitasi yang layak dan aman yang perlu mendapat perhatian Pemerintah Daerah diantaranya:

1. Pemerintah Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango belum menyediakan tempat penampungan air yang dapat dijangkau dengan mudah. Permasalahan tersebut mengakibatkan masyarakat tidak dapat mengonsumsi air dengan segera. Hal ini disebabkan karena Dinas PUPR belum memprioritaskan penyediaan infrastruktur air minum yang mudah dijangkau oleh masyarakat;
2. Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Tirta Bolango dan Perumda Tirta Limutu serta Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KPSPAMS) Desa selaku penyelenggara SPAM belum dapat memenuhi kebutuhan pokok air minum bagi masyarakat minimal 60 liter per hari per orang dan tersedia selama 24 jam, serta kualitas air minum yang diproduksi belum memenuhi standar kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
3. Perumda Tirta Bolango dan Perumda Tirta Limutu dan KPSPAMS Desa belum memproduksi air yang memenuhi standar kesehatan sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 492/MENKES/PER/IV/2010 Tahun 2010 tentang Persyaratan Kualitas Air Minum;
4. Dinas PUPR belum memprioritaskan anggaran untuk penyediaan kekurangan akses sanitasi berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan tangki septik terutama di area berisiko rawan sanitasi; dan
5. Dinas Kesehatan belum menyusun rencana dan strategi komunikasi perubahan perilaku masyarakat untuk berperilaku higienis dan saniter

BPK menyimpulkan bahwa permasalahan terkait keterjangkauan, ketersediaan dan kualitas air minum, merupakan penyebab belum optimalnya upaya Pemerintah Kabupaten Gorontalo dan

Kabupaten Bone Bolango dalam menyediakan akses air minum yang layak dan aman. Selain itu, permasalahan terkait sarana prasarana pembuangan (capture) dan penampungan (containment) serta perilaku masyarakat, merupakan penyebab belum optimalnya upaya Pemerintah Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango dalam menciptakan lingkungan yang sehat.

Berkaitan dengan permasalahan-permasalahan tersebut, diharapkan Pemerintah Daerah terkait memberikan perhatian yang serius dengan segera menindaklanjuti rekomendasi yang telah disampaikan BPK melalui Laporan Hasil Pemeriksaan.

Adapun sambutan dari Pemerintah Daerah yang diwakilkan oleh Penjabat Gubernur, Hamka Hendra Noer, menyatakan bahwa akan menindaklanjuti rekomendasi dari BPK sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Selanjutnya, sambutan dari Wakil Ketua I DPRD Provinsi Gorontalo, Moh. Kris Wartabone, menyatakan bahwa akan menindaklanjuti dan melakukan pemantauan serta pengawasan atas catatan dan rekomendasi yang diberikan oleh BPK. (htu/gto)

Subbagian Humas dan TU Kepala BPK Perwakilan Provinsi Gorontalo
Email: perwakilan.gorontalo@bpk.go.id